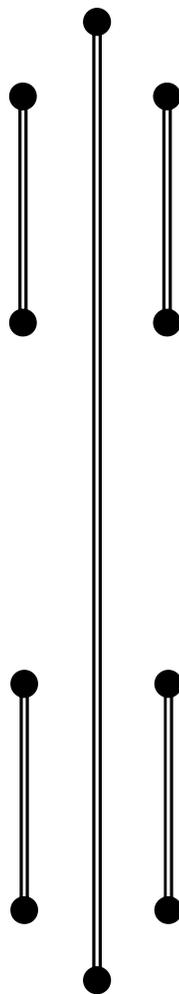




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)



DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Sosial ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial.

Kinerja Dinas diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target.

Berdasarkan analisis yang dilakukan melalui Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat terjadi efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Dinas Sosial pada tahun-tahun selanjutnya.

Ruteng, 15 Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Sosial,



DRS. PASKALIS BAILON LEBO

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19670517 199401 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I. PENDAHULUAN

1. Data Umum Organisasi
2. Aspek Strategis Organisasi / Peran Organisasi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah Dan Penyelenggaraan Pemerintahan
3. Struktur Organisasi
4. Sistematika Penyajian LAKIP

BAB II. PERENCANAAN

Rencana Strategis 2021 - 2026

- a. Visi
- b. Misi
- c. Tujuan, Sasaran Strategis dan Program
- d. Rencana Kinerja Tahunan
- e. Perjanjian Kinerja Tahunan

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Uraian Pengukuran Kinerja
- B. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja
- C. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Strategis Peningkatan Kinerja
- C. Uraian Ringkas Strategis Pemecahan Masalah

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Matriks Renstra
2. IKU
3. Pengukuran Kinerja

BAB I. PENDAHULUAN

1. Data Umum Organisasi
2. Aspek Strategis Organisasi / Peran Organisasi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah Dan Penyelenggaraan Pemerintahan
3. Struktur Organisasi
4. Sistematika Penyajian Lakip

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan manifestasi tanggung jawab Pemerintah sebagai urusan wajib bidang sosial dalam penyediaan pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat terutama bagi Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS).

Pada gilirannya diharapkan upaya tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan PMKS dalam melaksanakan peran dan fungsi sosial dalam masyarakat. Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Manggarai, komitmen pembangunan kesejahteraan sosial tersebut telah menjadi agenda utama pembangunan tahun 2016-2021, dengan strategis mencegah timbulnya Masalah Kesejahteraan Sosial dan Memberikan Pelayanan Sosial dan memberikan pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), melalui sistem panti dan luar panti atau berbasis masyarakat/komuniti, serta bantuan kepada korban bencana dalam meningkatkan keberfungsian sosialnya. Dengan arah kebijakan Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial terhadap PMKS dan terpeliharanya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial. Agenda utama pembangunan daerah tersebut sesungguhnya merupakan respon atas permasalahan kemiskinan yang masih cukup tinggi termasuk didalamnya penyandang permasalahan kesejahteraan sosial.

Untuk merealisasikan agenda strategis tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD 2021-2026 juga Peraturan Bupati Manggarai Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja pada Dinas Daerah Kabupaten Manggarai maka Dinas Sosial Kabupaten Manggarai menyelenggarakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang mencakup Program pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, Perlindungan dan jaminan Sosial serta Bantuan Sosial.

Kesejahteraan Sosial dan Pembinaan Lanjut serta Penyediaan pelayanan Sosial melalui 7 (Tujuh) Panti terhadap 5 jenis Penyandang Permasalahan kesejahteraan Sosial, disamping juga melaksanakan fungsi manajemen dan program pengembangan sumber daya kesejahteraan Sosial.

I. DATA UMUM ORGANISASI

Sesuai Peraturan Bupati Manggarai Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja pada Dinas Daerah Kabupaten Manggarai maka Dinas Sosial Kabupaten Manggarai dipimpin oleh Kepala Dinas dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang terdiri dari:

- a) Bidang Pemberdayaan Sosial
- b) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
- c) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
- d) Bidang Bantuan Sosial

Secara umum, capaian hasil pembangunan kesejahteraan sosial menunjukkan perkembangan yang baik dalam artian bahwa capaian pada tahun 2023 Dinas Sosial menetapkan target penanganan PMKS sebanyak **18.589** orang. Sedangkan realisasi penanganan PMKS mencapai **18.336** orang atau **98,64%**. Hasil Pembangunan Kesejahteraan Sosial ini secara tidak langsung telah memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan serta penurunan angka Disparitas Wilayah.

Pencapaian kinerja tersebut, tentu saja tidak terlepas dari beberapa kendala baik internal maupun eksternal. Kendala Internal diantaranya adalah kualitas SDM penyelenggara dan manajemen pelayanan kesejahteraan sosial yang masih terus menerus ditingkatkan, kondisi sarana dan prasarana yang belum memadai. Sedangkan kendala dan tantangan eksternal diantaranya adalah Sinergitas antar unit dan program serta ketersediaan anggaran yang belum memadai serta kecenderungan masih banyaknya populasi PMKS yang belum mendapatkan aksesibilitas pelayanan. Disisi lain, tantangan yang harus dihadapi Dinas Sosial adalah semakin besarnya tuntutan publik dalam optimalisasi Penyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial pada hakekatnya adalah merupakan bagian dari pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, yang sarannya diarahkan kepada Pembangunan Sumber Daya Manusia Bidang Kesejahteraan Sosial yang sebaik-baiknya serta penciptaan lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan dinamis.

Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat yang sebaik-baiknya dalam upaya menciptakan suatu kondisi tata kehidupan sosial yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, sehingga memungkinkan setiap warga masyarakat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosialnya secara layak bagi individu, keluarga maupun masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, meliputi: Kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial, dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan atau korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Proses pertumbuhan ekonomi dan perkembangan situasi dan kondisi politik di Indonesia, serta perkembangan masyarakat secara global dan Pembangunan yang kurang optimal, berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang dari tahun ke tahun cenderung meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya bahkan mengarah kepada masalah kesejahteraan sosial yang semakin kompleks.

Sementara peran serta masyarakat yang diharapkan turut serta bekerjasama sebagai mitra kerja Pemerintah dalam upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial, pada kenyataan dewasa ini belum memperlihatkan perkembangan hasil yang optimal sebagaimana diharapkan sesuai keberadaan dan peranannya sebagai Potensi sumber Kesejahteraan sosial masyarakat di bidang kesejahteraan sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Manggarai sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Manggarai yang bertugas membantu Bupati melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam bidang sosial. Untuk mendukung pencapaian Visi Kepala Daerah dalam lima tahun kedepan, Dinas Sosial Kabupaten Manggarai harus berperan aktif dalam mewujudkan visi tersebut, dengan mengemban misi lima, Mewujudkan supremasi hukum, kesetaraan gender dan Hak Asasi Manusia dengan tujuan Meningkatkan Aksesibilitas Perlindungan Sosial bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan Arah Kebijakan Penanganan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Tugas Pokok dan Fungsi ini mengamanatkan tanggung jawab kepada Dinas Sosial Kabupaten Manggarai dalam membina masyarakat miskin, orang terlantar, para penyandang cacat, masyarakat yang berada pada daerah rawan sosial dan ekonomi.

Sebagai sebuah Perangkat Daerah Dinas Sosial juga wajib mempertanggung jawabkan kinerjanya sebagaimana yang diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Keuangan dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap entitas pemerintah, daerah, kementerian/lembaga untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Sosial selama Tahun 2023.

Laporan Akuntabilitas Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2023 menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan secara *self assessment* atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, menunjukkan bahwa rata-rata persentase capaian kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah sbb :

NO	SASARAN STRATEGIS	NILAI CAPAIAN KINERJA
1	MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	98,64%
	Rata-rata	98,64%
	KATEGORI	SANGAT BAIK

II. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI / PERAN ORGANISASI DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten Manggarai, periode 2021-2026 difokuskan pada Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Manggarai melalui Lima Agenda Pokok Pembangunan Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 yang ditetapkan sebagai Kebijakan Program Pembangunan Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan Visi Dinas Sosial Kabupaten Manggarai yaitu: “**TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG PRODUKTIF,**

BERDAYA SAING DAN MANDIRI,” terdapat berbagai jenis tantangan yang harus dihadapi antara lain permasalahan dibidang sosial masih didominasi oleh permasalahan kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, korban bencana.

Namun berbagai permasalahan yang terkait dengan kelangsungan kehidupan kenegaraan seperti disintegrasi sosial dan kesenjangan sosial perlu mendapat perhatian yang serius dan berkelanjutan. Oleh sebab itu diperlukan penanganan permasalahan secara terfokus, profesional dan proporsional dalam mewujudkan visi, misi, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pokok, indikator kinerja dan dukungan sumber daya yang lebih jelas agar hasil penyelenggaraan kesejahteraan dibidang sosial menjadi lebih nyata manfaatnya bagi masyarakat dan lebih terukur kontribusinya dalam pembangunan nasional maupun daerah.

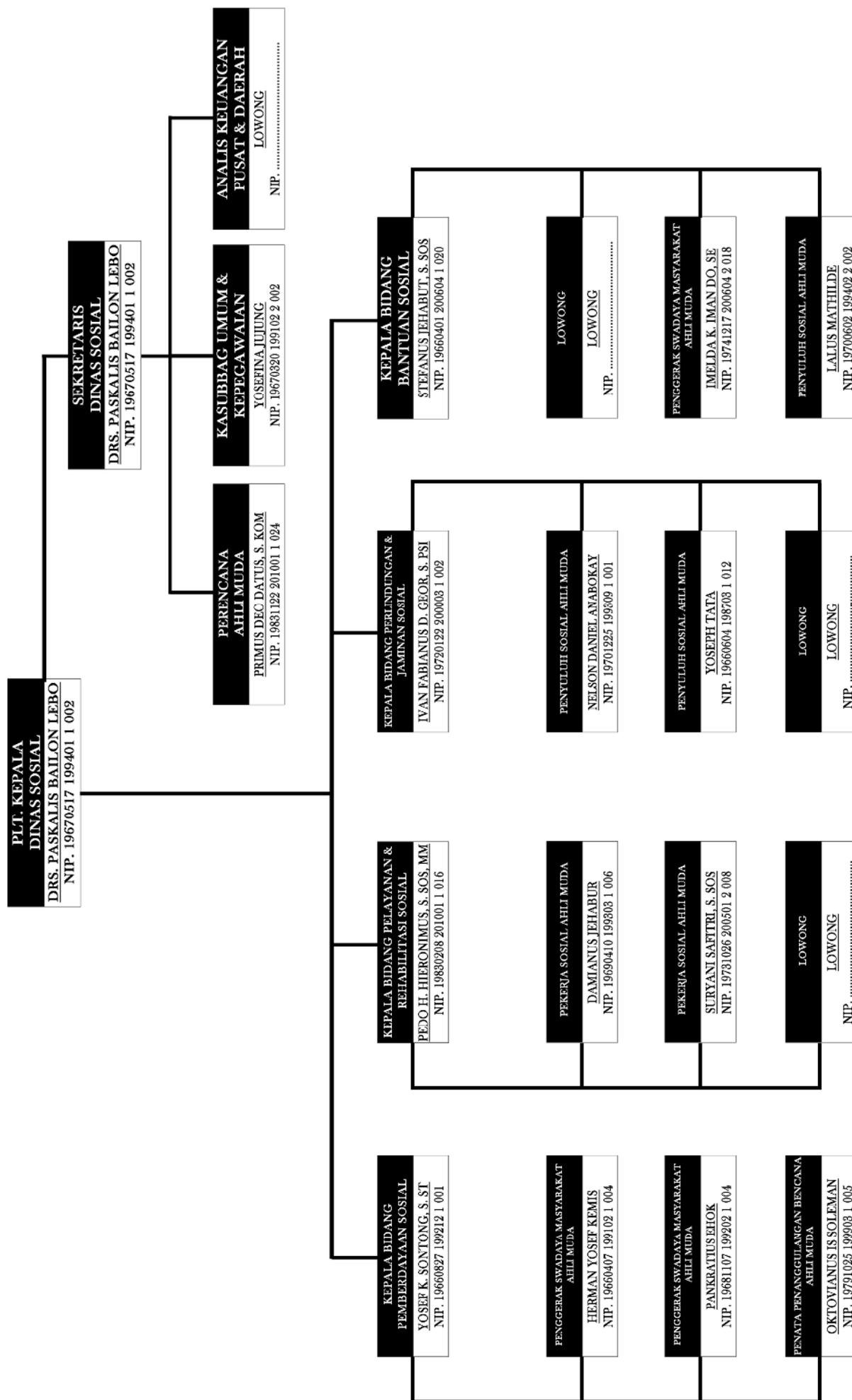
Seluruh aktivitas penyelenggaraan kesejahteraan dibidang sosial diarahkan untuk menangani berbagai permasalahan tersebut, sehingga secara terukur telah membangun landasan yang kondusif menuju terwujudnya masyarakat pada umumnya. Keberhasilan yang telah dicapai dalam perjalanan historis penyelenggaraan pemerintahan dibidang sosial akan membawa implikasi positif terhadap tingkat kemajuan yang signifikan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan kedepan. Tantangan yang dihadapi tercermin dari masih rendahnya kemampuan sosial ekonomi sebagian besar penduduk khususnya di Kabupaten Manggarai, masih rendahnya daya dorong perekonomian serta penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menjadi beban sosial baik dari jumlah PMKS maupun keterbatasan dana untuk mengintervensi PMKS.

III. STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL

Struktur Organisasi Dinas Sosial Terlampir

IV. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAKIP :

- BAB I : Pendahuluan yang memuat : Latar Belakang, Data Umum, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi dan Sistematisa Penyajian
- BAB II : Perencanaan Kinerja yang memuat Rencana Strategis Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- BAB III : Akuntabilitas kinerja yang memuat, Uraian Hasil Pengukuran Kinerja, Analisis Akuntabilitas Kinerja, Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan Pencapaian Sasaran, Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya dan Realisasi Keuangan
- BAB IV : Penutup



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. VISI

Pembangunan pada hakekatnya merupakan sebuah proses pemberdayaan masyarakat. Pada arus lokal, pemberdayaan masyarakat berarti pengembangan potensi yang ada dan dimiliki masyarakat untuk mencapai keadaan sejahtera. Untuk itulah perumusan visi yang jelas sangat penting peranannya bagi sukses tidaknya program pembangunan. Dalam konteks Kabupaten Manggarai, Visi Pembangunan yang ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Manggarai untuk periode 2021-2026 adalah **“MANGGARAI MAJU, ADIL, DAN BERDAYA SAING”**. Rumusan visi RPJMD periode 2021-2026 memiliki keterkaitan secara substansi maupun kata dengan Visi RPJPD. **ADIL** merupakan rumusan pokok visi yang memiliki persamaan dengan visi RPJPD, sedangkan **MAJU** dan **BERDAYA SAING** tidak terdapat di dalam visi RPJPD, namun tetap memiliki keterkaitan. Keterkaitan tersebut berupa harapan tentang kondisi daerah yang semakin maju dan berdaya saing di akhir periode pembangunan jangka panjang, sehingga mampu mencapai visi RPJPD makmur, sejahtera, adil, dan berkelanjutan di tahun 2026. Selain itu, visi RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026 juga dioperasionalkan melalui jargon “Manggarai Mberes” yang artinya Manggarai Kuat. Hal tersebut merupakan bentuk operasionalisasi visi Manggarai Maju, Adil, dan Berdaya Saing melalui penguatan-penguatan pada sektor unggulan yang akan menjadi dasar penopang kekuatan Kabupaten Manggarai, yaitu sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Melalui jargon tersebut diharapkan kedepannya tiga sektor utama yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masing-masing memiliki peran untuk menciptakan Kabupaten Manggarai yang maju dan kuat ketahanan ekonomi dan sumber daya manusianya

B. MISI

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menggambarkan seluruh aspek umum pembangunan yang menjadi arah dan prioritas pembangunan yang akan dijalankan Kabupaten Manggarai. Rumusan Misi RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026 sebagai berikut:

1. **MISI 1: MENINGKATKAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA**
2. MISI 2 : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT
3. MISI 3 : MENINGKATKAN MUTU LINGKUNGAN HIDUP
4. MISI 4: MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN MELAYANI

Permasalahan di bidang sosial di masa-masa yang akan datang masih didominasi oleh permasalahan kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan dan ketertinggalan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, korban bencana, serta tingginya angka pengangguran. Namun berbagai permasalahan yang terkait dengan kelangsungan kehidupan kenegaraan seperti disintegrasi sosial dan kesenjangan sosial perlu mendapat perhatian yang serius dan berkelanjutan.

Oleh sebab itu diperlukan penanganan permasalahan secara terfokus, profesional dan proporsional dalam mewujudkan visi, misi, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pokok, indikator kinerja dan dukungan sumber daya yang lebih jelas agar hasil penyelenggaraan kesejahteraan dibidang sosial menjadi lebih nyata manfaatnya bagi masyarakat dan lebih terukur kontribusinya dalam pembangunan nasional maupun daerah. Seluruh aktivitas penyelenggaraan kesejahteraan di bidang sosial telah diarahkan untuk menangani berbagai permasalahan tersebut, sehingga secara terukur telah membangun landasan yang kondusif menuju terwujudnya masyarakat pada umumnya.

A. TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM

TUJUAN
MENINGKATNYA KEBERDAYAAN SOSIAL MASYARAKAT

SASARAN
MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT

PROGRAM

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
2. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
3. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
4. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

B. ANALISIS SUMBER DAYA APARATUR

Pada Tahun 2024, jumlah Aparatur Sipil Negara yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Manggarai sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) orang yang terdiri dari:

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	DRS. PASKALIS BAILON LEBO NIP. 19670517 199401 1 002 Pembina Tk. I, IV/b	PLT. KEPALA DINAS	S1
2	DRS. PASKALIS BAILON LEBO NIP. 19670517 199401 1 002 Pembina Tk. I, IV/b	SEKRETARIS	S1
3	IVAN FABIANUS DJANUARDI GEOR, S.PSI NIP. 19720122 200003 1 002 Pembina, IV/a	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	S1
4	YOSEF KALASANSIUS SONTONG, S, ST NIP. 19660827 199212 1 001 Pembina, IV/a	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	D-IV
5	STEFANUS JEHABUT, S.SOS NIP. 19660401 200604 1 020 Penata Tingkat I, III/d	KEPALA BIDANG BANTUAN SOSIAL	S1
6	PEDO H. HIERONIMUS, S. SOS, MM NIP. 19830208 201001 1 016 Penata Tingkat I, III/d	KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL	S2
7	IMELDA K. IMAN DO, SE NIP. 19741217 200604 2 018 Penata Tingkat I, III/d	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA	S1
8	SURYANI SAFITRI, S.SOS	PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA	S1

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
	NIP. 19731026 200501 2 008 Penata Tingkat I, III/d		
9	BENEDITA SURIA DARMA, S.P NIP. 19660101 199102 2006 Penata Tingkat I, III/d	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA	S1
10	YOSEPH TATA NIP. 19660604 198703 1 012 Penata Tingkat I, III/d	PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA	SLTA
11	HERMAN YOSEF KEMIS NIP. 19660407 199102 1 004 Penata Tingkat I, III/d	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	
12	YOSEFINA JUJUNG NIP. 19670320 199102 2 002 Penata Tingkat I, III/d	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	SLTA
13	NELSON DANIEL ANABOKAY NIP. 19701225 199309 1 001 Penata Tingkat I, III/d	PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA	S1
14	LALUS MATHILDE NIP. 19700602 199402 2 002 Penata Tingkat I, III/d	PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA	SLTA
15	PRIMUS DEO DATUS, S.KOM NIP. 19831122 201001 1 024 Penata Tingkat I, III/d	PERENCANA AHLI MUDA	S1
16	OKTOVIANUS IS SOLEMAN NIP. 19791025 199903 1 005 Penata, III/c	PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA	SLTA
17	PANKRATIUS EHOK NIP. 19681107 199202 1 004 Penata Tingkat I, III/d	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA	SLTA
18	DAMIANUS JEHABUR NIP. 19690410 199303 1 006 Penata Tingkat I, III/d	PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA	SLTA
19	YUSTINUS SUHARDEDDY, S.SOS NIP. 19870601 202202 1 001 Penata Muda, III/a	PELAKSANA	S1
20	MAKARIUS IWANDI JEDARU, S.SOS NIP. 19950310 202202 1 001 Penata Muda, III/a	PELAKSANA	S1
21	HERMAN YOSEF MANEHAT, S. PD NIP. 19680407 199903 1 077 Pembina, IV/a	PELAKSANA	S1
22	ANSELMUS PERI NIP. 19720421 200701 1 024 Pengatur, II/c	PELAKSANA	SLTA
23	WILFRIDUS DALSON LAGUR NIP. 19760318 201406 1 001 Pengatur Muda Tingkat I, II/b	PELAKSANA	SLTA
24	AGUSTINUS WORO NIP. 19670101 200901 1 003 Pengatur Muda, II/a	PELAKSANA	SLTA
25	AMANDUS LEONJUN LUBIS NIP. 19861215 201212 1 003	PELAKSANA	SLTA

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
	Pengatur Muda, II/a		
26	SUTRISNO NIP. 19831126 201212 1 004 Pengatur Muda, II/a	PELAKSANA	SLTA
27	ADRIANUS SEPTIANUS NIP. 19801218 200903 1 006 Juru, I/c	PELAKSANA	SD

	JABATAN	ESELON	JUMLAH
1.	KEPALA DINAS	ESELON II
2.	SEKRETARIS	ESELON III/A	1 ORANG
3.	KEPALA BIDANG	ESELON III/B	4 ORANG
4.	JABATAN FUNGSIONAL dan KEPALA SUB BAGIAN	ESELON IV/A	12 ORANG

Dengan komposisi Aparatur Sipil Negara berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan pada Dinas Sosial Kabupaten Manggarai sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN			
		S2	S1	D-III	SLTA
1.	KEPALA DINAS	-	-	-	-
2.	SEKRETARIS	1	-	-	-
3.	KEPALA BIDANG	-	4	-	-
4.	JABATAN FUNGSIONAL dan KEPALA SUB BAGIAN	-	12	-	-

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026. Dengan metode penyusunan seperti ini diharapkan Rencana Kinerja Tahunan selama 5 tahun dapat menjawab permasalahan yang sedang atau akan dihadapi oleh masyarakat Manggarai, khususnya dalam bidang kesejahteraan sosial.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	PERSENTASE PMKS YANG TERTANGANI	3,1%

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Perangkat Daerah. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Setiap sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Manggarai dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program. Didalam setiap program tergabung sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan yang dilaksanakan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program.

Perencanaan kinerja tahunan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi penyelenggaraan manajemen yang baik, karena rencana kinerja menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk mencapai kinerja yang diinginkan dan dapat menjadi tolok ukur bagi organisasi/PD mencapai keberhasilan atau kegagalan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. (***Perjanjian Kinerja terlampir***)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Manggarai adalah bentuk tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Manggarai terkait keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Didalam bagian ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi pengukuran kinerja termasuk juga uraian sistematis tentang keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala tersebut.

A. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan setelah dilakukan penetapan indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi variabel masukan (*input*), variabel keluaran (*output*), dan variabel hasil (*outcome*). Hasil pengukuran kinerja dianalisis untuk menemukan alasan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan di Kabupaten Manggarai. Poin penting dari hasil pengukuran tersebut adalah memberikan umpan balik bagi upaya memelihara keberhasilan dan perbaikan kinerja kedepan jikalau ditemukan kegagalan dengan pelbagai permasalahannya.

Untuk mempermudah interpretasi atas capaian sasaran dari program dan kegiatan, maka capaian dimaksud dibagi dalam 5 (lima) kategori seperti berikut :

No	Capaian Kinerja	Kategori/Makna
1	≥100	Memuaskan
2	≥ 85-99	Sangat baik
3	≥ 70-84	Baik
4	≥50-69	Cukup
5	≤49	Kurang

Sebagaimana telah ditetapkan didalam Rencana Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2023, Dinas Sosial Kabupaten Manggarai telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Manggarai. Seluruh kegiatan tersebut merupakan bagian dari Rencana Kinerja Tahunan 2023 untuk mencapai sasaran strategis RPJMD.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Nilai Capaian Kinerja
1	MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	98,64%
Rata-rata		98,64%
Kategori		SANGAT BAIK

Sedangkan pada Tahun 2022, hasil pengukuran kinerja Dinas Sosial adalah:

No	Sasaran Strategis	Nilai Capaian Kinerja
1	MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	85,38%
	Rata-rata	85,38%
	Kategori	SANGAT BAIK

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Dinas Sosial Tahun 2023 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan.

Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (**jasmani, rohani, dan sosial**) secara memadai dan wajar.

Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Menurut Kementerian Sosial RI, saat ini tercatat ada 26 jenis PMKS dengan batasan pengertian dan criteria. Dan untuk tingkat Kabupaten Manggarai ada 5 jenis PMKS dengan uraian sebagai berikut :

1. **Anak Telantar** adalah seorang anak berusia 5 (lima) sampai 18 (delapan belas) tahun yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

Kriteria :

1. Berasal dari keluarga fakir miskin;
2. Anak yang mengalami perlakuan salah (kekerasan dalam rumah tangga);
3. Ditelantarkan oleh orang tua/keluarga, atau;
4. Anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga;
5. Anak yang tidak pernah sekolah atau tidak sekolah lagi dan tidak tamat SMP;
6. Makan makanan pokok kurang dari 2 kali sehari;
7. Memiliki pakaian kurang dari 4 stel layak pakai;
8. Bila sakit tidak diobati;
9. Yatim, Piatu, Yatim piatu;
10. Tinggal bersama dengan bukan orang tua kandung yang miskin;
11. Anak yang berusia kurang dari 18 tahun dan bekerja.

2. **Penyandang Disabilitas** adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas fisik dan mental.

Kriteria :

1. Mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari;
2. Mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari;
3. Tidak mampu memecahkan masalah secara memadai;
4. Penyandang disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara;
5. Penyandang disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik;
6. Penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda;

3. **Lanjut Usia Terlantar** adalah seseorang berusia 60 tahun atau lebih yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Kriteria :

1. Tidak ada keluarga yang mengurusnya;
2. Keterbatasan kemampuan keluarga yang mengurusnya;
3. Tidak terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari;
4. Menderita minimal 1 jenis penyakit yang dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan hidupnya;
5. Lanjut usia yang hidup dalam keluarga fakir miskin;

4. **Korban Bencana Alam** adalah adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Kriteria :

Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:

- 1.korban jiwa;
- 2.kerusakan lingkungan;
- 3.kerugian harta benda; dan
- 4.dampak psikologis.

5. **Wanita Rawan Sosial Ekonomi** adalah seorang perempuan dewasa berusia 18-59 tahun belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kriteria :

1. Perempuan berusia 18 – 59 tahun;
2. Istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan;
3. Menjadi pencari nafkah utama keluarga;
4. Berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak. (cek istilah BPS);

Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran Dinas Sosial Kabupaten Manggarai relatif kecil/terbatas, dimana intervensi untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan fungsi sosial PMKS juga rendah sedangkan jumlah PMKS yang seharusnya dibantu jumlahnya cukup banyak.

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut :

1. Indikator persentase lanjut usia dan penyandang disabilitas terlantar yang dibantu.

Program yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, dengan jumlah anggaran sebesar **Rp 97.548.000,-**, sedangkan realisasinya sebesar **Rp 96.818.500,-** atau **99,25%**. Anggaran ini dimanfaatkan untuk menyalurkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar/pokok berupa sembako bagi Lanjut Usia Terlantar dan Penyandang Disabilitas Terlantar, kemudian alat bantu bagi Penyandang Disabilitas Terlantar.

2. Indikator persentase pemberdayaan Karang Taruna dan juga Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang diberdayakan, Program yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah Program Pemberdayaan Sosial. Jumlah anggaran untuk mendukung indikator ini adalah **Rp 39.501.000,-** sedangkan realisasinya sebesar **Rp 39.362.066,-** atau **99,65%**. Anggaran ini dimanfaatkan untuk Pemberdayaan Karang Taruna melalui Pangkas Rambut Pemula, dan juga Perlengkapan Alat Tata Rias Pemula bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi.

3. Indikator Korban Bencana yang dibantu, Program yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah Program Penanganan Bencana. Jumlah anggaran untuk mendukung indikator ini adalah **Rp 21.706.000,-** sedangkan realisasinya sebesar **Rp 21.666.000,-** atau **99,82%**. Anggaran ini dimanfaatkan untuk bantuan beras bagi Korban Bencana Alam dan Sosial di Kabupaten Manggarai sepanjang Tahun 2023.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Target dan Realisasi Belanja pada Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 2.618.454.444,- dan realisasi sebesar Rp 2.383.192.105,- atau sebesar 91,02% dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA OPERASI	Rp 2.618.454.444	Rp 2.383.192.105	91,02%
- Belanja Pegawai	Rp 2.287.428.760	Rp 2.057.532.674	89,95%
- Belanja Barang	Rp 331.025.684	Rp 325.659.431	98,38%
TOTAL	Rp 2.618.454.444	Rp 2.383.192.105	91,02%

Target dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI s/d TW INI (Rp)	%
1	3	4	6	11	13	14	15
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	97,00	97,00	2.450.728.444,00	2.216.374.539,00	90,44
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp 2.951.000	Rp 2.951.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,00	2,00	Rp 1.765.000	Rp 1.765.000	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,00	1,00	Rp 1.186.000	Rp 1.186.000	100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp 2.316.213.244	Rp 2.086.083.674	90,06
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30,00	420,00	Rp 2.260.178.760	Rp 2.030.282.674	89,83
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11,00	11,00	Rp 56.034.484	Rp 55.801.000	99,58
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp 42.750.000	Rp 42.700.800	99,88

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI s/d TW INI (Rp)	%
1	3	4	6	11	13	14	15
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14,00	14,00	Rp 33.500.000	Rp 33.450.800	99,85
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25,00	17,00	Rp 4.250.000	Rp 4.250.000	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2,00	1,00	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp 16.250.000	Rp 12.160.000	74,83
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,00	1,00	Rp 2.250.000	Rp 1.733.000	77,02
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3,00	3,00	Rp 14.000.000	Rp 10.427.000	74,48
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp 72.564.200	Rp 72.479.065	99,88
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00	1,00	Rp 1.997.000	Rp 1.997.000	100,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI s/d TW INI (Rp)	%	
1	3	4	6	11	13	14	15	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1,00	1,00	Rp 26.901.000	Rp 26.815.865	99,68
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1,00	1,00	Rp 9.450.000	Rp 9.450.000	100,00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1,00	1,00	Rp 12.359.700	Rp 12.359.700	100,00
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12,00	0,00	Rp -	Rp -	#DIV/0!
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1,00	1,00	Rp 3.760.500	Rp 3.760.500	100,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,00	1,00	Rp 18.096.000	Rp 18.096.000	100,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase pekerja sosial profesional		78,00	78,00	Rp 39.501.000	Rp 39.362.066	99,65
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					Rp 39.501.000	Rp 39.362.066	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI s/d TW INI (Rp)	%	
1	3	4	6	11	13	14	15	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5,00	5,00	Rp 19.093.000	Rp 18.954.750	99,28
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6,00	6,00	Rp 20.408.000	Rp 20.407.316	100,00
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang berdaya	81,00	81,00	Rp 97.548.000	Rp 96.818.500	99,25	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				Rp 85.072.000	Rp 84.498.500		
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	30,00	30,00	Rp 56.236.000	Rp 56.098.200	99,75
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10,00	10,00	Rp 28.836.000	Rp 28.400.300	98,49
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				Rp 12.476.000	Rp 12.320.000		

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI s/d TW INI (Rp)	%
1	3	4	6	11	13	14	15
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	10,00	10,00	Rp 12.476.000	Rp 12.320.000	98,75
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase desa yang memiliki data PMKS yang tervalidasi	100,00	100,00	Rp 8.971.000	Rp 8.971.000	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				Rp 8.971.000	Rp 8.971.000	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	206054,00	206054	Rp 5.618.000	Rp 5.618.000	100,00
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	61589,00	61589	Rp 3.353.000	Rp 3.353.000	100,00
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial saat dan setelah masa tanggap darurat	100,00	100,00	Rp 21.706.000	Rp 21.666.000	99,82
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				Rp 21.706.000	Rp 21.666.000	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI s/d TW INI (Rp)	%	
1	3	4	6	11	13	14	15	
		Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	16000,00	18285	Rp 21.706.000	Rp 21.666.000	99,82
R A T A - R A T A					2.618.454.444,00	2.383.192.105,00	91,02	

Bab IV PENUTUP

1. KESIMPULAN

Dari hasil pengukuran kinerja yang telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 dapat dikatakan berhasil mencapai target. Persentasi rata-rata capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Manggarai pada Tahun Anggaran 2023 adalah 98,64%

2. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang adalah :

- Prioritas dan efisiensi anggaran, khususnya yang berkaitan dengan pengentasan masalah kesos;
- Meningkatkan koordinasi dan kerja sama lintas sektoral, baik secara vertikal maupun secara horizontal.

3. URAIAN RINGKAS MASALAH YANG DIHADAPI DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Secara umum masalah/hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas Dinas Sosial Kabupaten Manggarai pada Tahun Anggaran 2023, adalah masih terbatasnya pengalokasian anggaran untuk penanganan permasalahan kesejahteraan sosial apabila dikaitkan dengan luasnya jangkauan pelayanan sosial yang sangat kompleks.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan:

- Menerapkan skala prioritas pelaksanaan program/kegiatan dengan melihat situasi dan kondisi yang ada dilapangan;
- Alokasi anggaran yang besar untuk kegiatan-kegiatan yang diprioritaskan.

Ruteng, 15 Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Sosial,



DRS. PASKALIS BAILON LEBO
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19670517 199401 1 002